



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2024**

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntunan-Nya. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Belu dapat diselesaikan dengan baik, guna memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi Kabupaten Belu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, yang dikaitkan dengan dengan visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan analisis realisasi kinerja pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Belu sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa kinerja kami masih perlu penyempurnaan. Oleh Karena itu segala kritik, saran dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan kinerja kami dimasa yang akan datang. Besar Harapan kami laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dalam rangka evaluasi sehingga mampu memberikan masukan positif untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Belu.



Atambua, 17 Februari 2025

Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Belu

Blasius Manek Lonis, S. Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19691004 200112 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Struktur Organisasi	1
I.2. Fungsi dan Tugas	3
I.3. Keadaan Pegawai	4
I.4. Keadaan Sarana dan Prasarana	5
I.5. Keuangan	7
I.6. Sistematika LKIP	7
I.7. Isu-isu strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
II.1. Perencanaan Strategis	9
II.1.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	9
II.1.2. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	10
II.2. Perjanjian Kinerja	12
II.3. Rencana Anggaran Tahun Berjalan	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	15
III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kerja	21
III.3. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	26
IV.1. Simpulan Umum atas capaian kinerja Organisasi	26
IV.2. Langkah untuk meningkatkan kinerja organisasi	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah PNS pada Inspektorat Daerah Kab. Belu menurut Jabatan

Tabel 1.2 Jumlah PNS pada Inspektorat Daerah Kab. Belu menurut Pangkat dan Golongan

Tabel 1.3 Jumlah PNS pada Inspektorat Kab. Belu menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4 Rekapitulasi Asset, Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Belu

Tabel 1.5 Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Belu Tahun 2021 – 2024

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Belu

Tabel 2.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sasaran Jangka Menengah

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024

Tabel 2.4 Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2023

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.4 Capaian Indikator kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Tahun 2024

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) tahun 2024 dan 2023

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Belu Tahun 2024

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Anggaran

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Indikator Kerja Utama Inspektorat Daerah Kab. Belu
3. Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kab. Belu
4. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Belu Tahun Anggaran 2024

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bupati Belu Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Belu, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

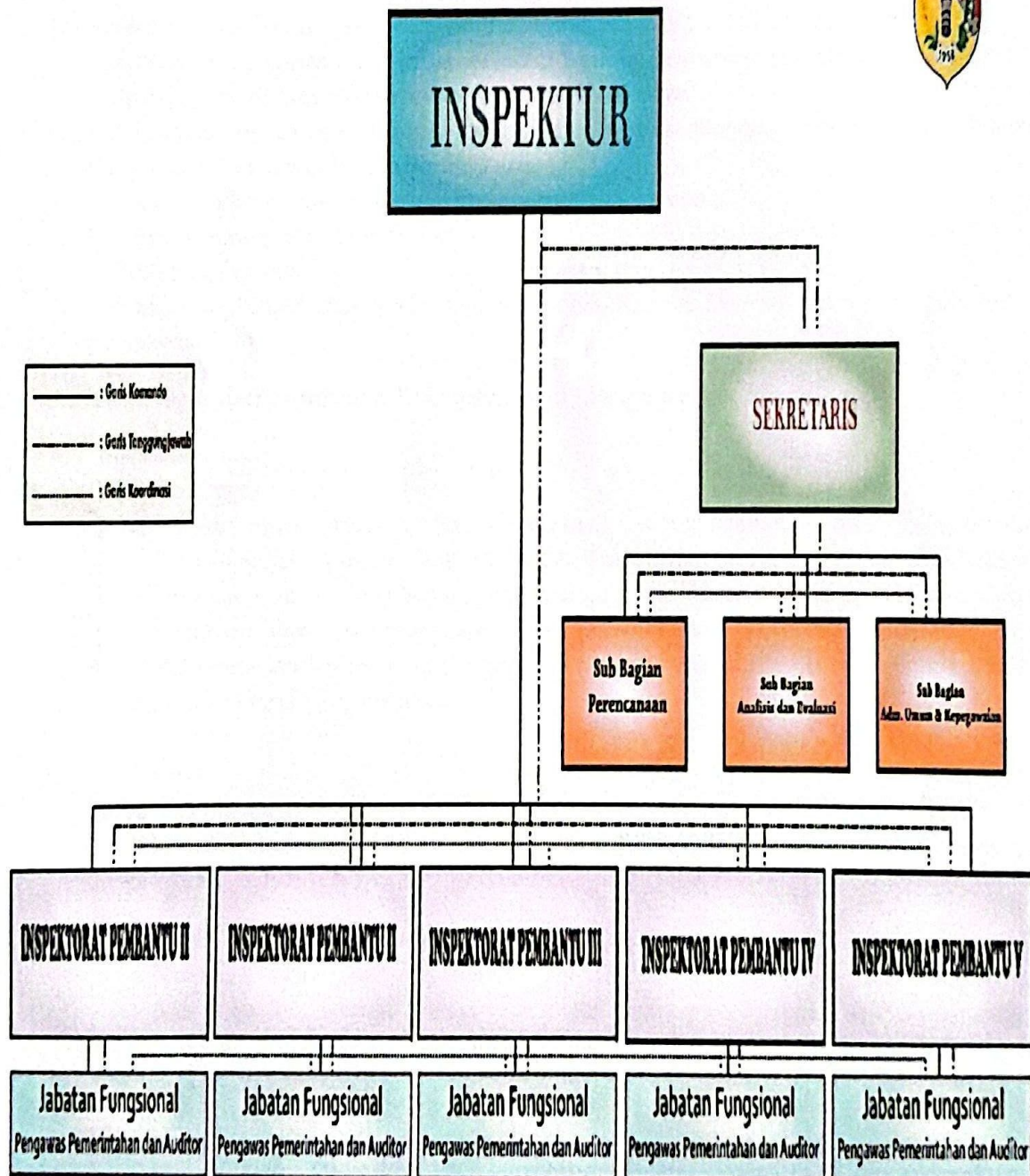
Sesuai kedudukan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Belu adalah sebagai berikut :

- ❖ Inspektur
- ❖ Sekretaris membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 - Sub Koordinator Substansi Perencanaan
 - Sub Koordinator Substansi Analisis dan Evaluasi
- ❖ Inspektur Pembantu Wilayah I
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- ❖ Inspektur Pembantu Wilayah II
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- ❖ Inspektur Pembantu Wilayah III
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- ❖ Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- ❖ Inspektur Pembantu Wilayah V
 - Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Belu adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BELU



1.2. Fungsi dan Tugas

Mengacu pada Peraturan Bupati Belu Nomor 39 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belu, Inspektorat Daerah Kabupaten Belu mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu oleh perangkat daerah.

Fungsi – fungsi yang harus dijalankan Inspektorat sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Pelaksanaan program reformasi birokrasi;
6. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang pengawasan.

Rumusan tugas dari Inspektorat Kabupaten Belu sebagai berikut :

A. Inspektur

Rumusan tugas :

Memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi perumusan kebijakan umum dan teknis pembinaan dan pengawasan, melalui kegiatan kesekretariatan, serta pembinaan dan pengawasan dalam bidang kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan dan pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku, demi terwujudnya kualitas kinerja inspektorat yang optimal.

B. Sekretaris

Rumusan tugas :

Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

B.1. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum & Keuangan

Rumusan tugas :

Melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penata usahaan, akuntansi verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

B.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Rumusan tugas :

Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan Kerjasama pengawasan dan dokumentasi.

B.3. Kepala Sub Bagian Analis dan Evaluasi

Rumusan tugas :

Melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan.

C. Inspektur Wilayah,

Rumusan Tugas :

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah dan pemerintah daerah.

C.1. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor ,

Rumusan tugas :

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah dan pemerintah desa.

I.3. Keadaan Pegawai

Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kabupaten Belu sampai keadaan sekarang berjumlah 46 (empat puluh enam) orang tenaga PNS yang diuraikan berdasarkan pangkat, golongan, Pendidikan dan jabatan serta standar kompetensi APIP sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah PNS dan P3K pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belu Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Inspektur	1
2	Sekretaris	1
3	Inspektur Wilayah	4
4	Kepala Sub Bagian	1
5	Jabatan Fungsional Lain	3
6	Jabatan Fungsional Auditor	22
7	Jabatan Fungsional P2UPD	3
8	Jabatan Fungsional Umum	7
	Jumlah	42

Sumber: Administrasi Umum dan Keuangan

Tabel 1.2

**Jumlah PNS dan P3K pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belu
menurut Pangkat dan Golongan**

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	2	3	4
1	Pembina Utama Muda	-	-
2	Pembina Tk. I	IV/b	6
3	Pembina	IV/a	8
4	Penata Tk. I	III/d	5
5	Penata	III/c	7
6	Penata Muda Tk. I	III/b	4
7	Penata Muda	III/a	4
8	Pengatur Tk. I	II/d	2
9	Pengatur	II/c	2
10	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
11	Pengatur Muda	II/a	1
12	Juru Tk. I	I/d	-
13	Juru	I/c	1
14		IX	2
	Jumlah		42

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Tabel 1.3

Jumlah PNS dan P3K pada Inspektorat Kab. Belu menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	Doktor/S3	-
2	Magister / S2	-
3	Sarjana / S1	32
4	Diploma / D3	6
5	SLTA	3
6	SLTP	1
7	SD	-
	JUMLAH	42

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

I.4. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Belu memiliki sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (Komputer, Printer, Meubeler dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang cukup memadai, sarana dan prasarana tersebut yaitu:

Tabel 1.4
Rekapitulasi Aset, Sarana Dan Prasarana Inspektorat Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2024

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Bangunan Gedung :			
	Bangunan Gedung kantor permanen	1 unit	Baik	
2	Alat angkutan:			
	Kendaraan Roda 4	5 unit	Baik	
	Sepeda motor	19 unit	Baik	
3	Alat bengkel dan alat ukur :			
	Scanner	2 buah	Rusak Berat	
4	Alat kantor :			
	Lemari kayu	13 buah	Baik	
	Papan nama instansi	1 buah	Baik	
	Mesin absensi	1 buah	Baik	
5	Alat rumah tangga :			
	Kursi besi/metal	50 unit	Baik	Kursi rapat frontline (biru)
	Kursi kayu/rotan/bambu	50 buah	Baik	
	Meja rapat	6 unit	Baik	
	Kursi putar	7 buah	Baik	
	Meja biro	30 buah	Baik	
	Sofa	2 unit	Baik	
	Gorden	6 unit	Baik	
	Lemari es	1 unit	Baik	
	Dispenser	2 unit	Rusak Berat	
	Televisi	1 unit	Baik	
	Sound system	2 unit	1Baik 1 Rusak Berat	
6	Peralatan computer :			
	PC/computer PC	5 unit	Rusak	
	Laptop	5 unit	Baik	
	Printer	7 unit	Rusak Berat	
	Monitor	1 unit	Baik	
7	Alat studio :			
	Layer proyektor	2 unit	Baik	
	Kamera elektronik	1 unit	Rusak Berat	
	Pesawat telepon	2 unit	Rusak Berat	
	Facsimile	1 unit	Rusak Berat	
	Drone	1 unit	Baik	
8	Unit – unit laboratorium :			
	Alat lab. Umum A lain-lain	1 unit	Baik	
	Core dril aspal (alat ukur ketebalan aspal)	1 unit	Baik	
	Alat ukur selimut beton digital	1 unit	Baik	
	GPS	1 unit	Baik	

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

I.5. Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Belu didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu (APBD II) Tahun 2024 sebesar Rp6.655.454.083,- (enam myliar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah). Berikut gambaran Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Belu TA 2021 s.d 2024:

Tabel 1.5
Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Belu Tahun 2021-2024

No.	Uraian Belanja	Tahun Anggaran				Ket.
		2021	2022	2023	2024	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3 (Rp)</i>	<i>4 (Rp)</i>	<i>5 (Rp)</i>	<i>6 (Rp)</i>	<i>7</i>
1.	Belanja Pegawai	3.117.443.072	4.137.046.626	4.035.620.688	4.751.334.083	
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.714.217.150	2.722.373.800	1.371.885.500	1.904.120.000	
	Total	5.831.660.222	6.859.420.426	5.407.506.188	6.655.454.083	

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

I.6. Sistematika LKIP

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini memuat Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas, Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana dan Prasana, Keuangan dan Sistematika LKIP.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini mencakup : (1) Perencanaan Strategis; (2) Perjanjian Kinerja ; (3) Rencana Anggaran Tahun Berjalan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bagian ini memuat Capaian Kinerja Organisasi, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, dan Realisasi Anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini menguraikan Simpulan Umum atas Kinerja Organisasi dan langkah untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi.

1.7. Isu-isu strategis

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat yaitu:

- a. Perlunya dukungan stakeholder terhadap peran Inspektorat Daerah dalam upaya mempertahankan opini WTP Pemerintah Kab. Belu.
- b. Masih lemahnya SPIP di Perangkat Daerah Kab. Belu
- c. Terbatasnya jumlah auditor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- d. Kurangnya kompetensi tenaga APIP dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.
- e. Kurangnya Infrastruktur terkait sarana dan prasarana untuk mendukung kapabilitas APIP.
- f. Disiplin dan Etos kerja yang belum berjalan maksimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Belu adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan jangka menengah yang bersifat indikatif yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Belu periode 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021.

Inspektorat Daerah Kabupaten Belu sebagai unsur yang menjalankan fungsi pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, diharapkan mampu berperan secara aktif mewujudkan suatu pengawasan yang mendukung terciptanya perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 ditetapkan untuk mendukung komitmen Bupati Belu dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 yang dimaksudkan untuk : 1) meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program SKPD; 2) menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran; 3) meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan; serta, 4) terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Berpijak dari hal tersebut diatas, maka proses penyusunan Renstra ini berorientasi pada hasil yang mampu dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dan menjamin konektivitasnya dengan dokumen RPJMD.

II.1.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan adalah pernyataan - pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Belu digambarkan sebagaimana pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Belu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Good Governance	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	Maturitas SPIP	Angka	2,9	3	3	3	3
			Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3
Catatan : Tujuan dan Sasaran Strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belu berdasarkan Profiling SAKIP Kabupaten Tahun 2024 oleh Kementrian PAN RB RI masih terdapat ketidasesuaian antara rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja, Inspektorat Daerah Kabupaten Belu akan melakukan penyesuaian mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang lebih SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time_bound) yang akan dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai hasil evaluasi Kemenpan RB.									

II.1.2. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kab. Belu

Inspektorat Daerah Kabupaten Belu dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Inspektorat Daerah Kabupaten Belu kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan, dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Belu.

Program prioritas dan kegiatan tersebut seperti tertera pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel. 2.2

Rencana Program, Kegiatan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Urutan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator (Output)	Satuan	Data capaian di awal Tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana SKPD		Unit Kerja Pemangku Anggaran	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
			INSPEKSI PENGANTARAN USHAH PEMBERANTARAN, INSPEKSI ORAT				5,831,222,722		5,597,104,143		5,664,375,466		5,732,021,110		5,802,545,985		5,873,575,493		34,201,724,919	INSPEKTORAT
Membantu dan Dukung Gubernur	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan teknologi informasi	1	PROGRAM PENINGKATAN USHAH PEMBERANTARAN DAERAH	Nilai BAKIP	Eyel dan Angka	CC		CC		CC		CC		CC		CC		8		INSPEKTORAT
					51,3	4,770,537,732	52	4,834,977,773	54	4,900,644,683	56	4,967,562,896	58	5,033,737,228	60	5,100,253,153	60	29,614,733,123	INSPEKTORAT	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	50	100	245,000,000	100	245,000,000	100	245,000,000	100	268,000,000	100	275,000,000	100	275,000,000	100	1,550,880,100	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12	3,943,279,780	12	3,943,279,780	12	3,958,279,780	12	3,963,279,780	12	3,984,279,780	12	4,000,279,780	12	23,792,670,600	Subbag Keuangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				153,077,942		198,197,993		220,800,000		244,203,006		276,477,446		319,973,373		1,412,809,850	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Pengadaan Jasa Penunjang Utama Pemerintahan Daerah				149,100,000		158,500,000		173,564,903		185,000,000		185,000,000		185,000,000		1,036,246,303	Subbag Umum dan Kepegawaian
		2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENCAHAYAN	Meningkatnya Proporsi Pelaksanaan Penganggaran Internal	Level 1	3	430,710,000	3	431,571,420	3	432,434,563	3	433,299,432	3	434,166,031	3	435,034,163	3	2,337,216,035	INSPEKTORAT
			Penyelenggaraan Pengawasan	Terwujudnya Pengawasan Internal yang Internal	%	100	430,710,000		431,571,420		432,434,563		433,299,432		434,166,031		435,034,163		2,337,216,035	
		3	PROGRAM PEMBERUKAN, KEBERAKAAN, PENGUMPAHAN DAN ANISTEN	Meningkatnya Perwujudan Kebajikan, Penderitaan dan Anisteni	Angka	2,05	329,975,000	2,9	330,634,950	3	331,296,220	3	331,958,012	3	332,622,730	3	333,287,975	3	1,989,774,187	INSPEKTORAT
			Perwujudan Kebajikan Takwa di Bidang Pengawasan dan Pendidikan Pengawasan, Pendampingan dan Anisteni	Terwujudnya Pengawasan Internal yang Internal	%	100	329,975,000	100	330,634,950	100	331,296,220	100	331,958,012	100	332,622,730	100	333,287,975	100	1,989,774,187	
		JUMLAH				5,831,222,722		5,597,104,143		5,664,375,466		5,732,021,110		5,802,545,985		5,873,575,493		34,201,724,919		

II.2. Perjanjian Kinerja

Prestasi kerja merupakan indikator kinerja pemerintahan sebagai fokus utama pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Belu. Prioritas yang dilakukan dalam perwujudan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Belu adalah :

- Peningkatan kompetensi Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP).
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang pengawasan baik pusat maupun daerah.
- Pemenuhan kebutuhan fasilitas kerja bagi aparatur pengawasan dalam mendukung peningkatan kinerja Aparatur.
- Melaksanakan fungsi pengawasan yang independen dan akuntabel.
- Mendorong terselenggaranya fungsi pengawasan masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan serta informasi masyarakat.
- Memberikan rekomendasi berkaitan dengan perbaikan kinerja obyek pemeriksaan.
- Terwujudnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dimaksud sebagaimana prioritas diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Belu pada tahun 2024 melakukan perjanjian kinerja yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Pengawasan Internal dan Kapabilitas APIP	Maturitas SPIP	Angka 3
		Kapabilitas APIP	Level 3

Catatan : Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah akan disesuaikan pada Pelaporan Kinerja Tahun Depan

II.3. Rencana Anggaran Tahun Berjalan

Tabel 2.4

Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Anggaran (Rp)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.317.510.483
1	<i>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000
2	<i>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.779.534.083
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.746.534.083
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.000.000
2	<i>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.950.900
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	11.750.900
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan tamu	53.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	110.700.000
3	<i>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	141.129.500

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.450.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	92.679.500
4	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	165.896.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	165.896.000
B	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	1.312.443.600
I	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internal	1.312.443.600
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	931.430.000
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	245.213.600
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	100.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	35.800.000
C	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi	25.500.000
	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah	25.500.000
	Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah	25.500.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian hasil kerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Evaluasi terhadap pencapaian Komponen kegiatan ini digunakan rumus:

$$\text{Hasil} \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Belu diupayakan menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcomes* dan menggambarkan keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Belu secara keseluruhan. Dalam menganalisis keberhasilan tersebut dilakukan dengan membandingkan target pencapaian indikator sasaran strategis dengan realisasinya.

Capaian kinerja dapat diuraikan pada tabel-tabel dibawah ini :

a. Realisasi Indikator kinerja

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	1	Maturitas SPIP	Angka	3	2,899	96,63
		2	Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100

b. Realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2023

Tabel. 3.2
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

No.	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	
					2024	2023
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	1	Maturitas SPIP	3	2,899	2,95
		2	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3

c. Realisasi kinerja berdasarkan target jangka menengah

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target
Jangka Menengah dalam Renstra

No	Sasaran	No	Indikator kinerja	Sat.	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Maturitas SPIP	Angka	3	2,899	96,63
		2	Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100

d. Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Tahun 2024

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Tahun 2024

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Sat	Tar get	Realisasi	Capaian (%)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2	2	100
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	45	45	100
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	dokumen	12	12	100

	keuangan SKPD	Keuangan SKPD				
2	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	1	100
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan tamu	laporan	1	1	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	13	13	100
3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	laporan	3	3	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	48	48	100
4	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	22	22	100
B	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan				

I	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal :	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internal				
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	laporan	40	40	100
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan	8	8	100
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	laporan	1	1	100
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dokumen	2	2	100
C	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi				
	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah				
	Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah	laporan	5	5	100

c. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Tahun 2023 dan 2024

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Tahun 2024 dan 2023

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Realisasi		Capaian (%)
			Tahun 2024	Tahun 2023	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2		100
2	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	13	100
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	3	100
2	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	4	100
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan tamu	1	1	100

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	13	25	100
3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	3	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	1	100
4	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	22	22	100
B	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan			
I	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internal			
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	40	40	100
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8	-	100

	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	-	100
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	-	100
C	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi			
	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah			
	Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah	5	-	100

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belu. Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab - sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah. Adapun evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dengan realisasi/capaian kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Maturitas SPIP	3	2,899	96,63
	Kapabilitas Apip	Level 3	Level 3	100

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis diatas Inpektorat Daerah Kabupaten Belu sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sarana adalah sebagai berikut :

a) *Maturitas SPIP*

Berdasarkan hasil penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Belu memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (**Berkembang**) dengan nilai 2,899 dan skor manajemen risiko indeks (MRI) sebesar 2,838 serta skor IEPK sebesar 2,694. Rincian hasil penilaian diuraikan sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1	Persiapan	20 %	78,33 %
2	Pelaksanaan	60 %	75,00 %
3	Pelaporan	20 %	93,03 %
4	Nilai Maturitas Penyelenggaran SPIP		2,899
5	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		2,838
6	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,694

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Indikator Kinerja Sasaran dan Target Sasaran Strategis Pemerintah Daerah masih berorientasi *output* bukan *outcome*.
2. Indikator Kinerja Sasaran dan Target Sasaran Strategis Perangkat Daerah masih berorientasi *output* bukan *outcome*.
3. Indikator Kinerja dan Target Sasaran Program masih berorientasi *output* bukan *outcome*.
4. Masih terdapat program dan kegiatan yang belum ditentukan sasaran program dan sasaran kegiatan.
5. Penerapan manajemen resiko belum diterapkan sesuai kebijakan, sehingga pengelolaan resiko strategis dan resiko operasional masih belum optimal.
6. Belum adanya kebijakan antikorupsi dalam rangka mengatasi kerentanan organisasi terhadap perilaku korupsi yang merusak dan merugikan sebagai sarana untuk mengarahkan strategi pengawasan dalam masalah korupsi yang terdiri atas tiga jenis strategi, yakni preventif, represif dan edukatif agar lebih efektif dalam rangka meningkatkan tata kelola manajemen resiko dan pengendalian korupsi di Pemerintah Kabupaten Belu.

b) *Kapabilitas APIP*

Capaian kinerja level kapabilitas APIP adalah berada pada level 3 tahun 2024, Pencapaian pada level 3 tersebut didasarkan pada hasil penilaian mandiri terhadap Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Belu yang selanjutnya menjadi dasar BPKP untuk memberikan Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) Kepada APIP Pemerintah Kabupaten Belu. Dalam Penilaian Kapabilitas APIP tersebut terdapat 6 elemen penilaian yaitu :

- Peran dan Layanan
- Manajemen Sumber Daya Manusia

- Praktik Profesional
- Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
- Budaya dan Hubungan Organisasi
- Struktur Tata Kelola

1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Belu

Berdasarkan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Belu, diperoleh kesimpulan bahwa Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Belu di "Level 3" sebagaimana uraian berikut :

No	Elemen	Level saat ini
1	Paparan dan Layanan	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	3
3	Praktik Profesional	3
4	Akutabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur Tata Kelola	3

Hasil penilaian menyimpulkan bahwa 6 elemen telah memenuhi level 3.

2. Hasil *Quality Assurance* Perwakilan BPKP Propinsi Nusa Tenggara Timur

Penjamin Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Belu menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Belu sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 berada pada "Level 3" sebagaimana uraian berikut :

No	Elemen	Level saat ini
1	Paparan dan Layanan	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	3
3	Praktik Profesional	3
4	Akutabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur Tata Kelola	3

3. Hasil Reviu atas Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belu

Hasil reviu atas Penjamin Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Belu menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Belu sesuai Perka BPKP nomor 16 Tahun 2015 berada pada "Level 3" sebagaimana uraian berikut :

No	Elemen	Level saat ini
1	Paparan dan Layanan	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	3
3	Praktik Profesional	3
4	Akutabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur Tata Kelola	3

III.3. Realisasi Anggaran

Inspektorat Daerah Kabupaten Belu mendapatkan alokasi anggaran untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp6.585.454.083,- (enam myliar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 6.242.284.707,- (enam myliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Anggaran

No. Kode	Program/ kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	5.317.510.483	4.965.403.107	93,79
1	<i>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>55.000.000</i>	<i>48.785.759</i>	<i>93,38</i>
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000	48.785.759	88,70
2	<i>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>4.779.534.083</i>	<i>4.450.525.124</i>	<i>93,12</i>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.746.534.083	4.417.525.124	93,07
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	33.000.000	33.000.000	100,00
2	<i>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>175.950.900</i>	<i>175.928.080</i>	<i>99,99</i>
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.750.900	11.750.900	100,00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	53.500.000	53.496.600	99,99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.700.000	110.680.580	99,98
3	<i>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>141.129.500</i>	<i>132.819.750</i>	<i>94,11</i>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.450.000	40.140.250	82,85
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.679.500	92.679.500	100,00

4	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	165.896.000	157.344.394	94,85
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165.896.000	157.344.394	94,85
B	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.312.443.600	1.251.381.600	95,35
I	Kegiatan : Penyelenggraan Pengawasan Internal	1.312.443.600	1.251.381.600	95,35
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	931.430.000	873.268.600	93,76
	Reviu Laporan Kinerja	245.213.600	242.313.000	98,82
	Reviu Laporan Keuangan	100.000.000	100.000.000	100,00
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	35.800.000	35.800.000	100,00
C	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	25.500.000	25.500.000	100,00
	Pendampingan dan Asistensi	25.500.000	25.500.000	100,00
	Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	25.500.000	25.500.000	100,00
	Jumlah	6.655.454.083	6.242.284.707	93,79

BAB IV PENUTUP

IV.1. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Belu tahun 2021– 2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Belu pada tahun 2024. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Inspektorat Daerah Kabupaten Belu mendapatkan alokasi anggaran untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp6.585.454.083,- (enam myliar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 6.242.284.707,- (enam myliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), dengan persentase mencapai 94,79 %.

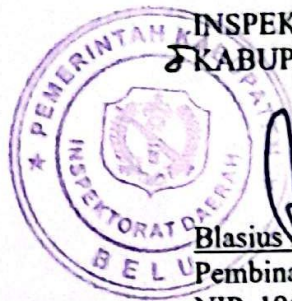
Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya berkaitan dengan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024, maka hasil penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Belu memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (Berkembang) dengan nilai 2,899 dan Capaian kinerja level kapabilitas APIP adalah berada pada level 3 tahun 2022, Pencapaian pada level 3 tersebut didasarkan pada hasil penilaian mandiri terhadap Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Belu yang selanjutnya menjadi dasar BPKP untuk memberikan Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) Kepada APIP Pemerintah Kabupaten Belu.

IV.2. Langkah untuk meningkatkan kinerja Organisasi

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Belu untuk meningkatkan kinerja organisasi yaitu :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan administrasi dan kegiatan lainnya.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan melalui Diklat, Bimbingan teknis dan pelatihan yang dapat memperluas wawasan Aparat Pengawas.
3. Menginstruksikan Inspektur Pembantu dan Kepala Sub. Bagian agar semua arsip tersimpan dengan baik dan akurat, sehingga akan mempermudah semua pelaporan.
4. Perlunya peningkatan koodinasi antar masing-masing Pejabat Struktural dalam melaksanakan Program dan kegiatan.
5. Membuat sistem pengumpulan data sehingga mempermudah kinerja tim penyusunan LKIP.
6. Melakukan analisa ulang terhadap target indikator kinerja agar dapat tercapai di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun untuk dapatnya digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat dijadikan *feedback* dalam penyusunan dokumen perencanaan pada masa-masa yang akan datang.



INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BELU,

Blasius M. Lohis, S. Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19691004 200112 1 006